

Research article

Analisis Kritis Fenomena *Cancel Culture* dan Ancaman terhadap Kebebasan Berekspresi

Critical Analysis of Cancel Culture Phenomena and Threats to Freedom of Expression

Puput Tripeni Juniman^{1,2}

¹ Pascasarjana Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia

² Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Indonesia

* puputtripeni@yahoo.com

Abstract

The digital platform grows rapidly and is no less important than the physical realm where people building all life necessities in both realms. In addition, the internet and social media are also places for voice and expression. In the midst of freedom of expression in the digital world, a new phenomenon known as the cancel culture, has emerged. This culture makes people, organizations and products rejected in the online presence which has also affected their physical reality. A massive cancellation culture can destroy a person's reputation and are often no longer accepted in both digital and real world. This study aims to analyze the impact of the culture on freedom of expression. This study departs from the philosophical framework of ontology, epistemology, axiology and the theory of freedom of expression developed by Thomas Scanlon. Employing a qualitative approach as well as a critical discussion of the topic being carried out, data was collected through literature studies from various journal articles and online news regarding cancel culture and freedom of expression. The results of the analysis show that cancel culture can threaten freedom of expression in both physical and digital realms.

Keywords

Cancel culture; digital platform; freedom of expression; social media.

Article history

Submitted: 19/02/2023; revised: 02/04/2023; accepted: 01/05/2023.



© 2023 by the author(s). Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Kehadiran internet memungkinkan setiap orang membangun reputasi melalui personal branding yang mereka tampilkan secara digital. Personal branding merupakan cara mengomunikasikan atribut yang menguntungkan individu dan membedakan diri dari orang lain untuk mencapai tujuan tertentu (Shaker & Hafiz, 2014). Studi menunjukkan bahwa personal branding penting dalam mempromosikan identitas pribadi untuk mencapai hasil yang menguntungkan (Gorbatov et al., 2019).

Orang yang mengelola personal branding dengan baik, memiliki kemungkinan lebih besar meraih popularitas yang sesuai atau mendekati harapannya (Amalia & Satvikadewi, 2020). Bagi orang yang berkarier di dunia hiburan, politik, maupun dunia digital, personal branding penting untuk menarik hati masyarakat atau audiens di dunia digital dan berdampak pada eksistensi di dunia nyata. Namun, sering kali citra di dunia digital berbeda bahkan bertolak belakang dengan dunia nyata. Situasi ini dapat menjadi masalah di era digital. Begitu citra dan kepercayaan masyarakat terganggu, maka seseorang akan menghadapi persoalan yang berat untuk mengembalikan citra yang menurun (Windriati et al., 2019). Ketika citra buruk seseorang yang memiliki reputasi baik di dunia digital terungkap, publik bisa berontak dengan menimbulkan berbagai gejolak di dunia digital. Salah satu bentuk gejolak yang muncul adalah *cancel culture* atau diartikan sebagai budaya pembatalan, penolakan, pengabaian atau boikot. *Cancel culture* didefinisikan sebagai strategi kolektif yang menggunakan tekanan sosial untuk melakukan pengucilan terhadap target (seseorang atau sesuatu) yang dituduh melakukan kata-kata atau perbuatan yang menyinggung (Norris, 2023). *Cancel culture* terkait dengan perilaku buruk yang terjadi di dunia nyata, sehingga ramai dibicarakan dan mendapatkan penolakan. Dalam beberapa kasus, *cancel culture* juga terjadi karena keburukan di masa lalu yang diungkap ke dunia digital pada saat ini. Keburukan itu dapat berupa perundungan, pelecehan seksual, perselingkuhan, hingga kekerasan. Kesalahan di masa lalu ini, lantas bisa menghancurkan reputasi yang sudah dibangun di dunia digital.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji fenomena *cancel culture*. *Cancel culture* pernah dikaji menggunakan konsep Neil Alperstein tentang kesadaran virtual kolektif. Dengan menggunakan lensa media baru, *cancel culture* juga dilihat sebagai bentuk gerakan perubahan baru (Waani & Wempi, 2021). Temuan empiris menunjukkan *cancel culture* bukan sekadar mitos retorik, melainkan dapat membungkam perspektif alternatif, mengucilkan orang yang melawan, dan

menghilangkan perdebatan intelektual (Norris, 2023). *Cancel culture* juga dipandang sebagai bentuk kepanikan moral yang berpotensi mengganggu konsep ruang publik (D. Clark, 2020). Meski terdapat sejumlah penelitian mengenai *cancel culture*, perlu lebih banyak kajian *cancel culture* lain dalam ranah digital (Ng, 2020). Penelitian ini ingin mengisi celah tersebut dengan mengkaji *cancel culture* menggunakan kerangka pemikiran filosofis ontologi, epistemologi, dan aksiologi dengan melihat keterkaitannya dengan kebebasan berekspresi.

Penulis melihat bahwa *cancel culture* berhubungan erat dengan kebebasan berekspresi. Hal ini berangkat dari asumsi dan pengamatan bahwa dalam sejumlah kasus, seseorang yang mendapat *cancel culture* tidak lagi memiliki ruang untuk menyuarakan pendapatnya di dunia digital maupun dunia nyata. Dalam sejumlah kasus, seseorang yang bersuara, berkomentar, maupun mengeluarkan pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan norma atau kepercayaan tertentu, bisa mendapat *cancel culture*. Pendapat mereka yang tersiar dengan cepat di media sosial, dengan cepat pula menuai kontroversi dan penolakan. Warganet juga mengambil langkah dengan memberikan hukuman berupa *cancel culture* yang digaungkan dengan petisi atau tagar #Cancel atau #Cancelled di media sosial untuk mengajak orang ramai-ramai menolak tokoh tersebut. Saat *cancel culture* menggema secara luas di ruang publik, karier dan kehidupan seseorang bisa hancur karena mendapat penolakan besar-besaran dari masyarakat. Seseorang bisa kehilangan pekerjaan, pembatalan kontrak, dituntut ganti rugi, dirundung, dikucilkan, dipermalukan, bahkan menghilang dari dunia maya. Hak kebebasan berekspresi di ruang publik yang mereka punya seolah dirampas oleh *cancel culture*.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan terkait bagaimana eksistensi *cancel culture* dilihat secara filosofis menggunakan konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian bagaimana kaitan *cancel culture* dengan kebebasan berekspresi dan apakah *cancel culture* ini merupakan ancaman bagi kebebasan dalam berekspresi. Untuk menjawab dua pertanyaan penelitian tersebut, peneliti ini akan menggunakan kerangka pemikiran filosofis yang digabungkan dengan teori kebebasan berekspresi yang dikembangkan oleh Thomas Scanlon (1972). Kerangka pemikiran filosofis digunakan untuk melihat bagaimana *cancel culture* bisa dikenal saat ini serta implikasinya. Sedangkan kebebasan berekspresi dari Scanlon akan melihat sejauh mana keterkaitan *cancel culture* dapat mengancam kebebasan berekspresi.

Kerangka pemikiran filosofis memiliki tiga kajian besar yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi (Aliyu et al., 2015). Aristoteles menyebut ontologi sebagai filosofi pertama. Ontologi merujuk pada sifat dari realita. Dalam filosofi, ontologi merujuk pada studi bagaimana sesuatu ada dan sifat dasar dari realita tersebut (Killam, 2013). Sementara itu, epistemologi menganalisis bagaimana seseorang bisa mengetahui sesuatu yang ada. Kajian ini merujuk pada hubungan fenomena dengan manusia. Epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana pengetahuan tentang fenomena itu dibentuk (Killam, 2013). Kemudian, aksiologi berkaitan dengan nilai dan etika. Dalam filosofi, aksiologi berkaitan dengan etika, estetika, dan religi (Killam, 2013). Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran ontologi, epistemologi, aksiologi akan digunakan untuk menganalisis eksistensi *cancel culture* yang berkembang saat ini.

Pada 1972, Scanlon menerbitkan makalah penting yang membela kaum libertarianisme (Scanlon, 1972). Scanlon menilai bahwa bentuk ekspresi apapun tidak boleh dibatasi. Pasalnya, isi dari setiap ekspresi adalah sakral. Setiap orang memiliki hak untuk mengekspresikan konten apa pun. Ekspresi juga harus dilindungi tanpa batas dari intervensi pemerintah, terlepas dari apakah itu salah atau mengarah pada konsekuensi yang berbahaya. Scanlon menekankan bahwa kunci dari konsepsi ini adalah ia tidak berbicara secara langsung tentang pandangan yang mungkin diizinkan untuk dibatasi, melainkan merujuk pada pembenaran yang tidak dapat digunakan untuk membatasinya.

Dalam konteks demokrasi, kebebasan berekspresi dinilai penting. Tidak mungkin ada demokrasi tanpa kebebasan berekspresi dan tidak ada kebebasan berekspresi jika tidak ada demokrasi (Restrepo, 2013). Kebebasan berekspresi yang demokratis dimulai dengan mengakui bahwa hak asasi setiap orang adalah sama dan akibatnya harus diberikan pertimbangan yang sama. Kebebasan yang datang dengan otonomi individu dan kolektif, memerlukan tanggung jawab dan tidak terikat dengan dominasi antar relasi. Dengan demikian, kebebasan bukanlah kekuasaan yang sewenang-wenang, melainkan kekuasaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. METODE

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif sekaligus diskusi kritis terhadap *cancel culture* dan kebebasan berekspresi. Studi literatur digunakan untuk

mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari studi literatur dan analisis dokumen pada jurnal akademis tentang *cancel culture* dan kebebasan berekspresi. Sedangkan data sekunder didapatkan dari analisis dokumen berbagai berita online. Dalam konteks ini, penulis menganalisis fenomena *cancel culture* melalui kerangka pemikiran filosofis dan kaitannya dengan kebebasan berekspresi yang digagas Scanlon dalam lingkup demokrasi.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1. Kajian Filosofis Ontologi Cancel Culture

Keberadaan *cancel culture* ditunjukkan melalui tanda, simbol, kata, dan nama yang melekat dan mewujudkan gagasan tersebut. Keberadaan bahasa tersebut membentuk makna *cancel culture* yang dipahami saat ini. *Cancel culture* terdiri dari dua kata yakni *cancel* dan *culture*. Setiap keberadaan kata tersebut membentuk makna tersendiri. Saat digabungkan, *cancel culture* melebur membentuk makna baru. Dari kata-kata inilah keberadaan *cancel culture* diyakini hidup di tengah dunia digital dan dunia nyata.

Secara etimologi, berdasarkan Online Etymology Dictionary, kata *cancel* berasal dari akar kata “canceler” dalam Bahasa Anglo-Prancis dan Prancis kuno pada abad ke-14 yang berarti mencoret dengan garis. Dalam Bahasa Latin, *cancel* berasal dari kata “cancellare” yang berarti menandai dengan garis silang sesuatu yang tertulis. *Cancel* juga berasal dari kata “cancelly” atau “cancellus” dalam bentuk plural variasi dari “carcer” yang berarti penjara. Sedangkan *culture*, berasal dari akar kata “cultura” pada pertengahan abad ke-15 dalam Bahasa Latin yang berarti pengolahan tanah dan “colere” yang berarti untuk merawat. Saat ini, dalam kamus Merriam-Webster, arti kata *cancel* adalah untuk berhenti melakukan atau berencana melakukan sesuatu; untuk memutuskan bahwa sesuatu tidak akan terjadi; menyebabkan (sesuatu) berakhir atau tidak lagi menghasilkan efek tertentu; untuk menghentikan (sesuatu) dari menjadi efektif atau valid. Sementara itu, *culture* berarti kepercayaan, adat istiadat, seni, dari masyarakat, kelompok, tempat, atau waktu tertentu; masyarakat tertentu yang memiliki kepercayaan, cara hidup, seni.; cara berpikir, berperilaku, atau bekerja yang ada di tempat atau organisasi (seperti bisnis).

Di era digital, *cancel* dan *culture* digunakan bersamaan membentuk istilah baru yakni *cancel culture*. Dalam kamus Merriam-Webster, *cancel culture* diartikan sebagai praktik atau kecenderungan melakukan pembatalan massal sebagai cara untuk

mengungkapkan ketidaksetujuan dan memberikan tekanan sosial kepada seseorang atau organisasi. Sejumlah ahli juga memaparkan apa tentang *cancel culture*. Holman (2020) menjelaskan *cancel culture* adalah fenomena baru memermalukan secara publik (*public shaming*) yang difasilitasi oleh media sosial. Media memainkan peran besar dalam persepsi masyarakat tentang *cancel culture*. Menurut Ng (2020), kemunculan awal *cancel culture* merupakan bentuk ekspresi akar rumput yang diikuti dengan meningkatnya kritik di media sosial. *Cancel culture* juga dilihat sebagai etos keragaman yang tumbuh dari *online shaming* atau memermalukan orang lain secara online dan didorong oleh gerakan *calling out* atau penolakan (Duque et al., 2021). *Cancel culture* juga disebut mirip dengan budaya boikot (English, 2021).

Cancel culture dapat terjadi pada siapa saja yang berkecimpung di dunia digital. *Cancel culture* biasanya menargetkan selebriti atau tokoh publik yang dianggap bertindak atau berbicara secara kontroversial dan bertentangan dengan kepercayaan yang ada pada suatu kelompok (Bromwich, 2018). Konsep *cancel culture* dikaitkan juga dengan tokoh politik terkenal, aktor, dan anggota masyarakat lainnya, bahkan dengan akademisi (da Silva, 2021). Menurut Meredith Clark dalam Bromwich (2018), orang yang memiliki atau kekuasaan, terutama pada ekonomi, juga rentan terhadap *cancel culture*.

Proses penolakan ini terjadi di platform internet dan media sosial seperti Twitter, TikTok, Facebook, dan Instagram. Menurut English (2021), strategi penolakan ini dilakukan beramai-ramai untuk memermalukan individu dengan tujuan memberikan hukuman dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda pada setiap orang. Proses ini melibatkan pemboikotan, memermalukan selebriti, organisasi, produk, atau individu. Bentuk dari *cancel culture* dapat berupa berhenti mengikuti halaman media sosial seseorang atau organisasi, berhenti menggunakan atau membeli produk terkait atau yang berafiliasi dengan tokoh tersebut, berhenti berpartisipasi dalam kegiatan yang menampilkan atau menghasilkan kekayaan untuk tokoh tersebut, dan menentang ide-ide atau karya yang ditawarkan oleh tokoh tersebut. *Cancel culture* juga menolak seseorang tampil di dunia digital untuk mengekspresikan pendapatnya, disertai dengan boikot dan penghinaan (Geran Pilon, 2020). Di ruang online, *cancel culture* bisa menjadi viral, menghasilkan petisi atau gerakan yang menyerukan industri hiburan untuk membuat perubahan drastis (Anderson-Lopez et al., 2021).

Gerakan yang masif dan membudaya memungkinkan *cancel culture* terjadi terus-menerus. Seperti yang dikatakan sosiolog James Davison Hunter (1992): "Kekuatan

budaya adalah kekuatan untuk mendefinisikan realitas, kekuatan untuk membingkai perdebatan, dan kekuatan itu berada di antara para elit,”. Jadi, *cancel culture* adalah penarikan segala bentuk dukungan (pemisra, pengikut media sosial, pembelian produk yang didukung oleh orang tersebut, dan lain sebagainya) bagi mereka yang dinilai telah mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak dapat diterima atau sangat bermasalah, umumnya dari perspektif keadilan sosial terutama terhadap seksisme, heteroseksisme, homofobia, rasisme, intimidasi, dan isu-isu terkait (Ng, 2020).

Salah satu interpretasi keberadaan *cancel culture* adalah budaya ini merayakan suara-suara minoritas, membatasi suara-suara konservatif, kulit putih, laki-laki dalam kebebasan berbicara dan secara paradoks membatalkan apa yang dianggap oleh suara-suara liberal sebagai wacana yang tidak benar secara politik (Duque et al., 2021). Gagasan *cancel culture* juga dianggap sebagai fenomena unik yang terjadi karena tuntutan kapitalisme di sisi produksi media, dan di sisi audiens oleh konektivitasnya ke media sosial (D. Clark, 2020). Audiens menuntut untuk mendapatkan produk atau konten yang sesuai dengan kepercayaan. Produsen media yang butuh audiens mau tak mau mendengarkan permintaan tersebut. Pada akhirnya, industri hiburan juga merupakan bisnis dan berusaha untuk membuat penggemar atau pelanggan senang (Anderson-Lopez et al., 2021).

Makna *cancel culture* memiliki implikasi yang signifikan untuk mendefinisikan wacana dalam kegiatan di dunia digital dan media sosial (D. Clark, 2020). Secara ontologi, keberadaan *cancel culture* dapat dimaknai dari kata-kata yang melekat di dalam gagasan tersebut. Namun, dalam praktiknya, keberadaan *cancel culture* bisa lebih jauh dari sekadar makna yang ada di dalamnya. *Cancel culture* dapat mengancam keberadaan dan eksistensi manusia di dunia digital dan dunia nyata.

3.2. Kajian Filosofis Epistemologi Cancel Culture

Secara epistemologi, pengetahuan mengenai *cancel culture* mulai dikenal luas beberapa tahun terakhir. Walaupun, menurut Clark, *cancel culture* sudah terdapat dalam konsep Jürgen Habermas tentang ruang publik atau public sphere yang menganggap wacana publik adalah ranah para elit (D. Clark, 2020). Saat itu, ruang publik memungkinkan masyarakat untuk menolak atau membatalkan wacana. Namun, pada saat itu, keberadaan *cancel culture* belum dikenal dengan nama *cancel culture* yang melekat saat ini.

Di era digital, *cancel culture* berawal dari satu peristiwa ke peristiwa lain yang semakin mengokohkan keberadaannya, sehingga disebut sebagai budaya di dunia digital. Fenomena *cancel culture* berawal dari tagar #cancelled yang pertama kali digunakan di komunitas Twitter orang kulit hitam atau Black Twitter di Amerika Serikat pada 2015 (Semiramis, 2019). Tagar ini digunakan untuk merujuk pada individu atau produk yang dianggap bermasalah. Media sosial membuat tagar ini dengan cepat digunakan banyak netizen di seluruh dunia.

Istilah *cancel culture* semakin dikenal saat muncul gerakan #MeToo pasca kasus pelecehan seksual Harvey Weinstein di Hollywood terungkap pada 2017. Ajakan untuk memboikot karya-karya Weinstein menggaung di media sosial. *Cancel culture* telah berevolusi dari etos online "outing" selebriti yang salah secara menjadi payung filosofi yang telah menggabungkan gerakan seperti #MeToo dan Black Live Matters (Duque et al., 2021). *Cancel culture* yang awalnya menargetkan selebriti dan dunia hiburan berkembang luas tidak memandang ras, kelas, ideologi politik, usia, ketenaran bahkan kepribadian.

Sejumlah tokoh publik pernah jadi korban *cancel culture* dengan dengan dampak yang beragam, mulai dari perundungan hingga kehilangan pekerjaan bahkan tak bisa lagi menggunakan media digital. Penulis JK Rowling juga pernah menjadi mendapatkan *cancel culture* karena berkomentar terkait transphobia pada 2019 lalu. Selain itu, Bill Gates, Johnny Depp, Kevin Spacey, Shania Twain, dan Taylor Swift juga pernah menjadi korban budaya pembatalan ini.

Tak hanya di Barat, *cancel culture* juga terjadi di Asia. Di Korea Selatan misalnya, selebriti yang terlibat skandal atau diketahui memiliki masalah langsung mendapat penolakan dari netizen. Misalnya, yang terjadi pada aktor Ji Soo pada awal 2021 (*Snowballing Bullying Scandal Deals Blow to TV Series Projects*, 2021). Seorang netizen yang mengaku sebagai teman Ji Soo menyatakan pernah menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual yang dilakukan Ji Soo saat duduk di bangku sekolah yakni sekitar 2006-2008. Kasus ini membuat Ji Soo mendapat kecaman dan *cancel culture*, sehingga harus keluar dari drama yang tengah dibintanginya. Rumah produksi terpaksa mencari aktor baru dan mengulang kembali proses syuting yang sudah selesai. Ji Soo juga dituntut ganti rugi karena melanggar kontrak kerja sama iklan. Selain Ji Soo, *cancel culture* juga terjadi pada aktor Kim Seon-ho pada Oktober 2021. Mantan kekasih Kim Seon Ho mengungkapkan sang aktor menuduh sang aktor memintanya melakukan aborsi, tidak bertanggung jawab, dan memiliki kepribadian yang berbeda dibandingkan yang tampil di layar kaca (*Actor Kim Seon-Ho Belatedly Admits to Abortion Rumors, Apologizes for "Carelessness,"* 2021). Alhasil, label yang

bekerja sama dengan Kim Seon-ho menghapus semua iklan yang terdapat Kim Seon-ho. Dia juga batal membintangi dua film yang akan tayang tahun depan.

Selain di Korea Selatan, *cancel culture* juga terjadi di Indonesia. Atlet esports Listy Chan pernah tersandung *cancel culture* lantaran ketahuan berselingkuh pada Juli 2020. Akibatnya, Listy dikeluarkan dari berbagai Klub Esports dan kehilangan banyak kontrak pekerjaan (Rialdi, 2020). Pembawa acara dan juga YouTuber Gofar Hilman juga mendapatkan penolakan lantaran kasus dugaan pelecehan seksual. Dia mendapat banyak hujatan di media sosial (tim, 2021a). Penyanyi dangdut Saipul Jamil juga mendapatkan *cancel culture* setelah keluar dari penjara karena kasus pedofilia. Netizen membuat petisi menolak Saipul Jamil tampil di televisi (Cahyani, 2021). Sejumlah kreator pun mengambil langkah menarik produksi mereka di saluran televisi yang menayangkan Saipul Jamil. Selebgram Rachel Vennya juga mendapatkan *cancel culture* dari masyarakat karena kabur dari wisma atlet. Desakan netizen membuat kasus Rachel Vennya diusut kepolisian. Rachel Vennya juga menyetop endorse di Instagramnya, sebelum akhirnya akun Instagramnya hilang dari dunia digital (tim, 2021b).

Di sisi lain, beberapa *cancel culture* yang menyerang selebriti justru tidak begitu berpengaruh terhadap karier mereka (Semiramis, 2019). Misalnya, Kanye West yang mendapatkan penolakan karena berpendapat terkait perbudakan. Di saat yang sama, penjualan Album Kanye tetap laris manis dan menempati peringkat pertama di tangga lagu Billboard. Hal yang sama juga terjadi pada penyanyi Ariana Grande yang kerap disebut melakukan perusakan budaya. Akan tetapi nama Ariana Grande justru semakin dikenal.

Kejadian demi kejadian tersebut membentuk pengetahuan dan keabsahan *cancel culture* di dunia digital dan dunia nyata. Peristiwa-peristiwa itu membuat *cancel culture* menjadi budaya yang berbeda dibandingkan dengan perilaku lain di media sosial. Peristiwa satu dan yang lain juga membentuk suatu kesamaan, sehingga menciptakan budaya penolakan yang kemudian dikenal dan diakui kebenarannya sebagai *cancel culture*.

3.3. Kajian Filosofis Aksiologi Cancel Culture

Kajian aksiologi memunculkan pertanyaan bagaimana *cancel culture* dilihat dari sudut pandang etika dan moral? Apakah *cancel culture* dapat dikatakan sebagai sesuatu yang beretika dan bermoral? Perdebatan muncul terkait persoalan ini. Di

satu sisi, *cancel culture* menjadi hal yang dianggap baik karena dapat menunjukkan keadilan sosial dan politik yang kesetaraan. Di sisi lain, *cancel culture* juga dikritik karena menjadi tempat bagi orang-orang yang merasa lebih baik secara moral (Bouvier, 2020). Sering kali *cancel culture* menjadi toksik karena dimanfaatkan untuk pengungkapan aib tanpa adanya refleksi dari orang lain (Anderson-Lopez et al., 2021).

Pertanyaan lanjutan muncul terkait apa yang membuat seseorang dapat dikatakan boleh mendapatkan *cancel culture* dan apa pula yang membuat seseorang boleh melakukan *cancel culture* kepada orang lain? Apa yang membuat seseorang boleh dijatuhi hukuman *cancel culture*? Seberapa berat kesalahan seseorang sehingga dia boleh di-*cancel*? Hingga saat ini, tidak ada ukuran tertentu yang membuat seseorang dapat dikatakan layak mendapatkan *cancel culture*. Begitu pula dengan hal yang mendasari, sehingga seseorang berhak melakukan *cancel* kepada orang lain.

Cancel culture juga dipertanyakan lantaran apakah dampak yang brutal sebanding dengan pelanggaran yang dibuat oleh pelaku. Menurut Henderson, *cancel culture* lebih menunjukkan kesenangan atau euforia bersama yang dilakukan untuk melawan orang lain (Henderson, 2019). Hal ini memunculkan pertanyaan berikutnya, seberapa besar *cancel culture* yang boleh diterima seseorang setelah melakukan suatu kesalahan baik itu besar atau kecil.

3.4. *Cancel Culture dan Kebebasan Berekspresi*

Selain perkara etika dan moral, *cancel culture* juga dinilai dapat merusak kebebasan berekspresi. *Cancel culture* mengancam eksistensi dan keberadaan manusia di dunia digital yang bakal berimbas ke dunia nyata. Budaya penolakan ini dianggap mampu memberi efek jera pada orang yang berbuat kesalahan fatal. *Cancel culture* menunjukkan bagaimana sirkulasi konten di dunia digital memfasilitasi respons cepat dalam skala besar terhadap tindakan individu atau organisasi yang dianggap bermasalah, seringkali upaya ini memberdayakan kelompok yang terpinggirkan (Ng, 2020). Namun, di sisi lain *cancel culture* juga dianggap merusak kebebasan berekspresi.

Cancel culture dinilai menghalangi orang untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat mereka dengan bebas, sehingga hal ini mengancam partisipasi dalam lingkungan yang bebas berekspresi (English, 2021). J.K. Rowling, Gloria Steinem, Margaret Atwood, David Brooks, Noam Chomsky, dan sejumlah tokoh lainnya

pernah menulis surat yang dipublikasikan di Harper's Bazaar pada Juni 2020. Mereka berpendapat bahwa *cancel culture* tidak mewadahi debat di ruang publik dan dinilai tidak memiliki tempat untuk counter speech. Alih-alih *cancel culture*, perlu budaya yang memberi ruang untuk bereksperimen, mengambil risiko, dan melakukan kesalahan.

Cancel culture menghilangkan proses penilaian dan pertimbangan dalam perdebatan di ruang digital. Euforia dalam meng-*cancel* seseorang membuat proses dalam mengetahui titik terang persoalan menjadi hilang. *Cancel culture* membuat netizen memberikan hukuman yang tergesa-gesa dan tidak proporsional (D. Clark, 2020) . *Cancel culture* fokus secara eksklusif atau berlebihan pada aspek negatif individu sambil mengabaikan aspek positif, atau membiarkannya ditimbang oleh aspek negatifnya, sehingga menolak semua aspek positif (da Silva, 2021). Sementara itu, menurut Semíramis (2019) , *cancel culture* menunjukkan fakta bahwa lembaga-lembaga yang ada gagal mengatasi masalah ketidakadilan sosial. Ketiadaan musyawarah dalam menghukum seseorang dengan *cancel culture* menunjukkan ketidakmampuan elit memahami dampak konektivitas media sosial yang menggeser dinamika kekuatan ruang publik di era digital. *Cancel culture* juga merupakan bentuk keadilan mentah dan protes sosial yang tidak seimbang yang secara luas dapat disamakan dengan konsep penamaan dan penghinaan, atau profil sosial, dengan maksud menyebabkan kerusakan reputasi yang tidak dapat diubah kembali .(Bilal et al., 2019)

Pada akhirnya, jika terus dibiarkan merajalela, bukan tidak mungkin budaya penolakan yang kejam ini merusak kebebasan berekspresi di dunia digital dan dunia nyata. Eksistensi manusia juga bisa hilang saat berperilaku tanpa berpikir dan hanya mengedepankan emosi yang garang. Begitu pula saat tanggung jawab bukan lagi menjadi dasar perilaku dan kehidupan di dunia nyata dan dunia digital, *cancel culture* bisa mengancam hakikat dan keberadaan manusia.

4. SIMPULAN

Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan dunia digital menuntun manusia pada suatu budaya baru yang bernama *cancel culture* atau budaya penolakan. Berbagai bukti empiris menunjukkan keberadaan *cancel culture* merampas hakikat manusia untuk bebas berekspresi. Perkembangan *cancel culture* yang masif ini tak diikuti dengan pola pikir kritis dan bertanggung jawab dari pengguna media sosial. Hasilnya, *cancel culture* berkembang menjadi bentuk hukuman yang semena-mena

dan tidak berdasar. Keabsahan *cancel culture* yang tidak terbendung mengancam keberadaan manusia di dunia digital dan dunia nyata.

Cancel culture dapat dipandang sebagai konsekuensi yang timbul dalam menggunakan dunia digital. Dalam kata lain, *cancel culture* bisa dipandang sebagai hukum atau sanksi sosial yang dijatuhkan masyarakat di era digital, sama halnya dengan pengucilan dan memermalukan di dunia nyata. *Cancel culture* terbentuk dari pola interaksi yang muncul di dunia digital. Keberadaan fenomena ini layaknya disikapi dengan waspada. Keberadaan *cancel culture* membuat setiap orang, terutama tokoh publik harus waspada, tidak hanya terhadap apa yang mereka katakan dan lakukan saat ini, tetapi juga tindakan mereka di masa lalu. *Cancel culture* dapat menjadi pegangan setiap orang untuk berperilaku di dunia digital dan dunia nyata. Pasalnya, setiap kesalahan dapat diungkap ke publik dan menjadi viral, lalu mendapat penolakan dari masyarakat.

Sebagai pengguna internet dan media sosial, seseorang juga semestinya dapat berpikir dengan kritis dan rasional dalam menilai suatu kejadian atau peristiwa. Sebaiknya, hindari menghakimi seseorang tanpa mengetahui fakta dan kebenaran di baliknya. Terapkan juga pola pikir simpati dan empati untuk lebih memahami orang lain di dunia digital. Cara-cara ini dapat membendung *cancel culture* yang diberikan tanpa alasan atau sebab yang jelas.

REFERENSI

- Actor Kim Seon-ho belatedly admits to abortion rumors, apologizes for "carelessness." (2021, October 20). Yonhap News Agency. <https://en.yna.co.kr/view/AEN20211020003900315>
- Aliyu, A. A., Singhry, I. M., Adamu, H., & AbuBakar, M. M. (2015). Ontology, epistemology and axiology in quantitative and qualitative research: Elucidation of the research philophical misconception. *Proceedings of the Academic Conference: Mediterranean Publications & Research International on New Direction and Uncommon*, 2(1), 1054–1068.
- Amalia, T. W., & Satvikadewi, A. (2020). Personal Branding Content Creator Arif Muhammad (Analisis Visual pada Akun Youtube@ Arif Muhammad). *Jurnal Representamen*, 6(01).
- Anderson-Lopez, J., Lambert, R. J., & Budaj, A. (2021). Tug of war: Social media, cancel culture, and diversity for girls and the 100. *Kome: An International Journal of Pure Communication Inquiry*, 9(1), 64–84.

- Bilal, M., Gani, A., Lali, M. I. U., Marjani, M., & Malik, N. (2019). Social profiling: A review, taxonomy, and challenges. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 22(7), 433–450.
- Bouvier, G. (2020). Racist call-outs and cancel culture on Twitter: The limitations of the platform's ability to define issues of social justice. *Discourse, Context & Media*, 38, 100431.
- Bromwich, J. E. (2018). Everyone is canceled. *The New York Times*, 28.
- Cahyani, I. A. (2021, September 7). *Komnas PA Minta Seluruh Stasiun TV Boikot Saipul Jamil: Tidak Mendidik*. <https://www.tribunnews.com/seleb/2021/09/07/komnas-pa-minta-seluruh-stasiun-tv-boikot-saipul-jamil-tidak-mendidik>
- D. Clark, M. (2020). DRAG THEM: A brief etymology of so-called “cancel culture.” *Communication and the Public*, 5(3–4), 88–92.
- da Silva, J. A. T. (2021). How to shape academic freedom in the digital age? Are the retractions of opinionated papers a prelude to “cancel culture” in academia? *Current Research in Behavioral Sciences*, 2, 100035.
- Duque, R. B., Rivera, R., & LeBlanc, E. J. (2021). The Active Shooter paradox: Why the rise of Cancel Culture, “Me Too”, ANTIFA and Black Lives Matter... matters. *Aggression and Violent Behavior*, 60, 101544.
- English, M. (2021). *Morgan English: Cancel Culture: An Examination of Cancel Culture Acts as a Form of Counterspeech to Regulate Hate Speech Online*.
- Geran Pilon, J. (2020). 2020 America and the cancel culture of fools. *Israel Journal of Foreign Affairs*, 14(2), 183–196.
- Gorbatov, S., Khapova, S. N., & Lysova, E. I. (2019). Get noticed to get ahead: The impact of personal branding on career success. *Frontiers in Psychology*, 10, 2662.
- Henderson, R. (2019). The atavism of cancel culture. *City J*.
- Holman, K. J. (2020). *Can you come back from being cancelled? A case study of podcasting, cancel culture, and comedians during# MeToo*. University of Nebraska at Omaha.
- Hunter, J. D. (1992). *Culture wars: The struggle to control the family, art, education, law, and politics in America*. Avalon Publishing.
- Killam, L. (2013). *Research terminology simplified: Paradigms, axiology, ontology, epistemology and methodology*. Laura Killam.
- Ng, E. (2020). No grand pronouncements here...: Reflections on cancel culture and digital media participation. *Television & New Media*, 21(6), 621–627.
- Norris, P. (2023). Cancel culture: Myth or reality? *Political Studies*, 71(1), 145–174.
- Restrepo, R. (2013). *Democratic freedom of expression*.
- Rialdi, I. F. (2020, July 16). *Imbas Kasus Perselingkuhan, Atlet Esports Listy Chan Resmi*

- Dipecat EVOS*. Suara. <https://www.suara.com/sport/2020/07/16/121640/imbaskasus-perselingkuhan-atlet-esports-listy-chan-resmi-dipecat-evos>
- Scanlon, T. (1972). A theory of freedom of expression. *Philosophy & Public Affairs*, 204–226.
- Semiramis. (2019, April 10). *The Untold Truth about 'Cancel Culture.'* Medium. <https://medium.com/@vcasaisvila/the-untold-truth-about-cancel-culture-3675cac983c3>
- Shaker, F., & Hafiz, R. (2014). Personal branding in online platform. *Global Disclosure of Economics and Business*, 3(3), 7–17.
- Snowballing bullying scandal deals blow to TV series projects*. (2021, March 4). Yonhap News Agency. <https://en.yna.co.kr/view/AEN20210304006200315>
- tim. (2021a, June 9). *Kronologi Pelecehan Seksual yang Dituduhkan pada Gofar Hilman*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210609090843-234-652004/kronologi-pelecehan-seksual-yang-dituduhkan-pada-gofar-hilman>
- tim. (2021b, October 23). *Akun Instagram Rachel Vennya Menghilang*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20211023070522-234-711250/akun-instagram-rachel-vennya-menghilang>
- Waani, M. S., & Wempi, J. A. (2021). Cancel culture as a new social movement. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(7), 266–270.
- Windriati, A. R., Darmawan, A., & Romadhan, M. I. (2019). Peran public relations dalam membangun citra di Atlantis Land Surabaya. *Representamen*, 5(1).